



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
BAGIAN ANGGARAN 005.01.1200.547678.000.KD

Semester I TA 2018

BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Laporan Keuangan Semester I PTA Bandar Lampung

Bagian Anggaran 005.01.1200.547678



Badan Urusan Administrasi



Mahkamah Agung Republik Indonesia



Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
Jl. Basuki Rahmat No. 24 Teluk Betung Utara Bandar Lampung
Telp : (0721) 489813 - 489814 Fax (0721) 476054
Web. www.pta-bandarlampung.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Agama mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Bandar Lampung, 2 Juli 2018
Kuasa Pengguna Anggaran,

Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M.
NIP. 19680904 199303 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	26
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	35
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	46
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	52
F. Pengungkapan Penting Lainnya	55
VI. Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun 2018 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bandar Lampung, 2 Juli 2018
Kuasa Pengguna Anggaran,

Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M.
NIP. 19680904 199303 1 004

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Semester I Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2018.

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp10,099,088,- atau mencapai 567,05 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1,781,000,-.

Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp8,096,152,387,- atau mencapai 40,35 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp20,062,693,000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2018. Nilai Aset per 30 Juni 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp26,079,446,328,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp75,487,584,- ; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,- ; Aset Tetap (neto) sebesar Rp25,999,701,426,- ; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp4,257,318,-

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp70.000.000,- dan Rp26,009,446,328,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan

surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp10,099,038,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp7,801,463,939,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(7,791,364,901),- . Surplus Kegiatan Non Operasional dan Surplus (Defisit) Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp484,648,- dan sebesar Rp 0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(7,790,880,253),-

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp25,666,454,742,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(7,790,880,253),- ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp (691,460,-) dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp8,134,563,299,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2018 adalah senilai Rp 26,009,446,328,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 30 Juni 2018 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018		% thd Angg	2017
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	1,781,000	10,099,088	567.05	17,284,361
JUMLAH PENDAPATAN		1,781,000	10,099,088	567.05	17,284,361
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	16,558,772,000	6,788,732,948	41.00	6,390,901,157
Belanja Barang	B.4	1,637,585,000	645,119,439	39.39	943,000,000
Belanja Modal	B.5	1,866,336,000	662,300,000	35.49	367,000,000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	#DIV/0!	-
JUMLAH BELANJA		20,062,693,000	8,096,152,387	40.35	7,700,901,157

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
NERACA
PER 30 JUNI 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2018	31 Desember 2017
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	70,000,000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	5,487,584	7,160,070
Jumlah Aset Lancar		75,487,584	7,160,070
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	14,913.607.000	14,913,607,000
Peralatan dan Mesin	C.15	4,919,016,580	4,223,466,580
Gedung dan Bangunan	C.16	9,703,196,000	9,703,196,000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	1,294.917.000	1,294,917,000
Aset Tetap Lainnya	C.18	65.860.978	65,860,978
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	0	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(4,896,896,132)	(4,531,166,982)
Jumlah Aset Tetap		25,999,701,426	25,669,880,576
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	25,000,000	25,000,000
Aset Lain-Lain	C.22	6,770,000	6,770,000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(27,512,682)	(26,881,341)
Jumlah Aset Lainnya		4,257,318	4,888,659
JUMLAH ASET		26,079,446,328	25,681,929,305
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	70,000,000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	15,474,563
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		70,000,000	15,474,563
JUMLAH KEWAJIBAN		70,000,000	15,474,563
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	26,009,446,328	25,666,454,742
JUMLAH EKUITAS		26,009,446,328	25,666,454,742
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		26,079,446,328	25,681,929,305

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	10,099,038	11,511,002
JUMLAH PENDAPATAN		10,099,038	11,511,002
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	6,788,732,948	6,388,960,557
Beban Persediaan	D.3	34,583,521	54,447,279
Beban Barang dan Jasa	D.4	278,735,558	320,263,259
Beban Pemeliharaan	D.5	217,297,219	362,547,315
Beban Perjalanan Dinas	D.6	102,845,662	188,009,650
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	379,269,031	234,299,144
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		7,801,463,939	7,548,527,204
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(7,791,364,901)	(7,537,016,202)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1,871,789	8,589,084
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(1,387,141)	(2,765,950)
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		484,648	5,823,134
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(7,790,880,253)	(7,531,193,068)
POS LUAR BIASA	D.12		
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(7,790,880,253)	(7,531,193,068)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2018	30 Juni 2017
EKUITAS AWAL	E.1	25,666,454,742	10,669,118,093
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(7,790,880,253)	(7,531,193,068)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(691,460)	648,226
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	(691,460)	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	648,226
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	8,134,563,299	7,683,616,796
KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS		342,991,586	153,071,954
EKUITAS AKHIR	E.5	26,009,446,328	10,822,190,047

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Dasar Hukum

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual Pada Laporan Keuangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

9. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

Rencana Strategis

Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992 tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Peresmian operasional Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 1993

oleh Ketua Mahkamah Agung RI yang diwakili oleh hakim agung M. Yahya, S.H. bertempat di Pendopo Gubernur Provinsi Lampung. Selanjutnya tanggal tersebut dijadikan momentum peringatan HUT Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung setiap tahunnya.

Tahun 2015 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung 2015 – 2019 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada tahun 2015 s.d 2019 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Visi Mahkamah Agung adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara. Sedangkan Misi Mahkamah Agung adalah :

- Menjaga kemandirian badan peradilan
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Kemudian visi dan misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Tinggi Agama Bandar

Lampung sebagai visi dan misinya.

Adapun Visi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung adalah : Mewujudkan Peradilan Agama Yang Agung di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung . Sedangkan Misi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

- Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- Meningkatkan kinerja manajemen peradilan diwilayah Pengadilan Tinggi Agama Banda Lampung.
- Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- Melaksanakan tertib admistrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- Mendorong terbentuknya pengadilan agama di kabupaten/kota pemekaran di Provinsi Lampung.
- Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Didasari oleh visi dan misi tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menetapkan tujuan strategis sebagai berikut :

- Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
- Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
- Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Bandar Lampung dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.
- Pelayanan peradilan agama yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

- Tenaga teknis yang berkualitas dan profesional.
- Manajemen Teknologi Informasi dalam pelayanan peradilan agama.
- Tersedianya sarana dan prasarana sebagai supporting unit seluruh kegiatan tupoksi PTA. Bandar Lampung.

Lalu dari tujuan strategis diatas ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

- Meningkatnya penyelesaian perkara
- Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
- Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
- Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).
- Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
- Meningkatnya kualitas pengawasan
- Peningkatan kualitas SDM
- Peningkatan layanan perkantoran dan penyediaan , perawatan, pemeliharaan sarana dan prasarana.

Selain itu sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Banding yang di tunjuk Mahkamah Agung dalam mengelola, membina, mengawasi dan mengontrol / memonitoring pelaksanaan pelaporan sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang di lingkup wilayahnya memiliki visi dan misi tersendiri yang didasari oleh visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tersebut diatas.

Adapun Visi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam hal keuangan adalah Mewujudkan Laporan Keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami sehingga tidak diragukan lagi

akan menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami sehingga dapat diyakini kewajarannya oleh auditor eksternal. Sedangkan Misi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam hal keuangan adalah sebagai berikut :

- Mewujudkan pelaksanaan & pengelolaan manajemen satuan kerja yang baik dan berkesinambungan.
- Meningkatkan kualitas efisiensi, efektifitas kinerja satuan kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
- Mewujudkan sumber daya manusia di bidang pelaporan yang profesional, bersih, berwibawa dan berakhlakul karimah di lingkungan PTA. Bandar Lampung.
- Mewujudkan pelaporan keuangan & pelaporan barang yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).

Kemudian Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai satuan kerja juga menetapkan tujuan strategis sebagai berikut :

- Terelenggaranya pelaporan di bidang keuangan dan BMN yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).
- Terwujudnya manajemen satuan kerja yang cepat, akurat dan bebas KKN.
- Meningkatnya pengelolaan pelaporan keuangan & pelaporan BMN yang efektif, efisien dan akuntabel.
- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang pelaporan keuangan & pelaporan BMN.

Lalu dari tujuan strategis diatas ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

- Memperjuangkan peningkatan anggaran DIPA yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan, yang terdiri dari :
 - Anggaran yang digunakan untuk kegiatan pengumpulan data ADK dan konsultasi bulanan dengan KPPN Bandar Lampung.
 - Anggaran yang digunakan untuk kegiatan rekonsiliasi data semesteran dengan KPKNL Bandar Lampung.
 - Anggaran yang digunakan untuk kegiatan pelatihan operator dalam rangka mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan / diselenggarakan oleh Korwil / KPPN / DJPB / KPKNL / DJKN mengenai peraturan-peraturan baru / aplikasi berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan.
 - Anggaran yang digunakan untuk pembuatan dan pencetakan laporan keuangan dan laporan barang semesteran dan tahunan.
 - Anggaran yang digunakan untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi bulanan dengan Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Kekayaan Negara.
 - Anggaran yang digunakan untuk pengelolaan alat tulis kantor (ATK) kegiatan korwil.
- Membuat perencanaan jadwal rutin satuan kerja sesuai dengan tupoksi yang terdiri dari :
 - Jadwal kegiatan pengumpulan data ADK dan konsultasi bulanan dengan KPPN Bandar Lampung, yaitu setiap awal bulan.
 - Jadwal kegiatan pengumpulan Data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Wilayah dan satuan kerja baik LRA yang menggunakan format per mata anggaran kegiatan (MAK) per program maupun format aplikasi SAK. Kegiatan ini

dilakukan sebelum tanggal 15 setiap bulannya.

- Jadwal kegiatan rekonsiliasi data semesteran dengan KPKNL Bandar Lampung. Kegiatan ini dilakukan setiap awal bulan 7 (tujuh) tahun anggaran berjalan dan awal bulan 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
- Jadwal kegiatan rekonsiliasi data semesteran dengan Ditjen Kekayaan Negara Lampung. Kegiatan ini dilakukan setiap awal bulan 7 (tujuh) tahun anggaran berjalan dan awal bulan 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
- Jadwal kegiatan pelatihan operator-operator baru dan sosialisasi peraturan-peraturan / aplikasi berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan. Kegiatan pelatihan dan pembinaan operator-operator baru dilaksanakan setahun sekali setiap awal tahun.

Jadwal kegiatan penyusunan dan pencetakan laporan keuangan satuan kerja dan laporan barang satuan kerja semesteran dan tahunan. Kegiatan ini dilakukan 2 (dua) kali setiap akhir bulan 7 (tujuh) tahun anggaran berjalan dan akhir bulan 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

- Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pelaporan keuangan & pelaporan BMN.
 - Untuk pelatihan dan pembinaan, kegiatan difokuskan pada pelatihan dan pembinaan operator-operator baru akibat dari operator yang lama terkena proses mutasi. Ini adalah masalah klasik yang mau tidak mau pasti akan dihadapi. Karena itu setiap korwil seharusnya sudah mempersiapkan kemungkinan seperti ini dengan

mempersiapkan pelatihan dan pembinaan secara terjadwal setiap tahun sekali.

➤ Sedangkan untuk kegiatan sosialisasi di fokuskan kepada penyampaian peraturan-peraturan baru seperti peraturan penyampaian laporan pendapatan dan belanja secara akrual, pengisian format BKU dengan rumus excel, cara pembuatan/pengisian laporan realisasi anggaran per MAK per program dan LRA format Aplikasi SAIBA dan lain-lain. Lebih lanjut, selain sebagai Korwil di Lampung Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai satuan kerja memiliki visi dan misi tersendiri yang didasari oleh visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tersebut diatas. Adapun visi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai satuan kerja adalah mewujudkan laporan keuangan satuan kerja yang relevan, andal dapat dibandingkan serta dapat dipahami sehingga tidak diragukan lagi akan menghasilkan laporan keuangan wilayah yang relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami sehingga dapat diyakini kewajarannya oleh auditor eksternal.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung TA 2017 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,

pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis

Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan

yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat

dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan

kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan

operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama

Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak

berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak	50

Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan
Rp10.099.088,-*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp 10.099.088,- atau mencapai 567,05 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.781.000,- Pendapatan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan	781,000	10,099,038	1,293.09
Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL	-	50	-
Penerimaan kembali persekot / uang muka gaji	1,000,000	-	-
Jumlah	1,781,000	10,099,088	567.05

Realisasi Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan TA 2018 mengalami penurunan 41,57 persen dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan sebesar 28,01 % namun disisi lain menurunnya penerimaan kembali belanja pegawai TAYL dan penerimaan kembali persekot/uang muka gaji yang sangat signifikan yang dikarenakan pada akhir 2017 Sekretaris Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran internal untuk mempercepat pelunasan uang muka gaji sehingga tahun 2018 PTA Bandar Lampung tidak mempunyai penerimaan kembali persekot/uang muka gaji.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	10,099,038	7,889,502	28.01
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	50	5,773,359	-100.00
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	3,621,500	-100.00
Jumlah	10,099,088	17,284,361	-41.57

B.2 Belanja

*Realisasi Belanja
Negara
Rp8.096.152.387*

Realisasi Belanja instansi pada TA 2018 adalah sebesar Rp8.096.152.387,- atau 40,35% dari anggaran belanja sebesar Rp20.062.693.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2018

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	16,558,772,000	6,788,732,948	41.00
Belanja Barang	1,637,585,000	645,119,439	39.39
Belanja Modal	1,866,336,000	662,300,000	35.49
Total Belanja Kotor	20,062,693,000	8,096,152,387	40.35
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	20,062,693,000	8,096,152,387	40.35

Dibandingkan dengan TA 2017, Realisasi Belanja TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 5,13% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain karna meningkatnya belanja modal yang sebagian besar direncanakan untuk 5 Pengadilan Agama baru dibawah PTA Bandar Lampung.

Perbandingan Realisasi Belanja TA Juni 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	6,788,732,948	6,390,901,157	6.22
Belanja Barang	645,119,439	943,000,000	(31.59)
Belanja Modal	662,300,000	367,000,000	80.46
Jumlah	8,096,152,387	7,700,901,157	5.13

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp6.788.732.948

Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2018 dan 30 Juni 2017 adalah masing-masing sebesar Rp6.788.732.948,- dan Rp6.390.901.157,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 6,22% persen dari TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain karena penambahan jumlah pegawai.

Perbandingan Belanja Pegawai TA Juni 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	1,543,365,700	1,641,040,800	(5.95)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	20,385	19,980	2.03
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	124,647,350	118,145,760	5.50
Belanja Tunj. Anak PNS	27,699,848	23,878,300	16.00
Belanja Tunj. Struktural PNS	45,855,000	32,670,000	40.36
Belanja Tunj. Fungsional PNS	3,993,920,000	3,622,260,000	10.26
Belanja Tunj. PPH PNS	775,780,785	664,324,457	16.78
Belanja Tunj. Beras PNS	66,191,880	71,188,860	(7.02)
Belanja Uang Makan PNS	183,817,000	190,378,000	(3.45)
Belanja Tunj. Umum PNS	27,435,000	26,995,000	1.63
Jumlah Belanja Kotor	6,788,732,948	6,390,901,157	6.22
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	6,788,732,948	6,390,901,157	6.22

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp645.119.439

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp645.119.439,- dan Rp943.000.000,-. Realisasi Belanja Barang TA 2018 mengalami penurunan -31,59% dari Realisasi Belanja Barang TA 2017. Hal ini antara lain disebabkan karna belum terserapnya seluruh anggaran TA 2018.

Perbandingan Belanja Barang TA Juni 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	218,367,770	229,616,925	(4.90)
Belanja Barang Non Operasional	104,962,475	506,000	20,643.57
Belanja Jasa	61,310,538	87,469,484	(29.91)
Belanja Pemeliharaan	214,580,319	358,459,315	(40.14)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	10,755,000	208,309,150	(94.84)
Belanja barang persediaan	35,143,337	58,639,126	(40.07)
Jumlah Belanja Kotor	645,119,439	943,000,000	(31.59)
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	645,119,439	943,000,000	(31.59)

Belanja Modal
Rp662.300.000

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp662.300.000,- dan Rp367.000.000,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 80,46% dibandingkan TA 2017 dikarenakan naiknya belanja modal peralatan dan mesin yang direncanakan untuk penambahan 5 satker Pengadilan Agama baru di bawah PTA Bandar Lampung.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA Juni 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A. 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	662,300,000	367,000,000	80.46
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0.00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	662,300,000	367,000,000	80.46
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	662,300,000	367,000,000	80.46

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA Juni 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A. 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp662.300.000,- mengalami kenaikan sebesar 80,46 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp367.000.000,-. Hal ini disebabkan oleh penambahan peralatan dan mesin sebagai fasilitas gedung yang direncanakan untuk satker Pengadilan Agama baru di bawah PTA Bandar Lampung.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

TA Juni 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi	462,300,000	274,000,000	68.72
Alat pengolah data dan komunikasi pendukung SIPP	200,000,000	93,000,000	-
Jumlah Belanja Kotor	662,300,000	367,000,000	80.46
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	662,300,000	367,000,000	80.46

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2018 dan 2017*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A 2017	NAIK (TURUN) %
Penambahan nilai gedung & bangunan	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	-

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A 2017	Naik (Turun)
Belanja Modal Jaringan	0	0	0.00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0.00

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp70.000.000,-

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp70.000.000,- dan Rp0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 30 Juni 2018
dan 31 Desember 2017

Uang Tunai	70,000,000	-
Kas lainnya atau setara kas	-	-
Jumlah	70,000,000	-

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp 0,-

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA Juni 2018 dan
2017

Keterangan	2018	TH 2017
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	-	-

C.3 Piutang PNB

Piutang PNB
Rp0,-

Saldo Piutang PNB per tanggal 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,- Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNB TA Juni 2018 dan 2017

Uraian	2018	TH 2017
utang PNB	-	-
utang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

C.4 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp0,-

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

C.5 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lancar
Rp 0,-

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

C.6 Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar
di Muka Rp0,-

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan 0,- Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka TA Juni 2018 dan 2017

Jenis	2018	TH 2017
Belanja pegawai dibayar dimuka	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
Jumlah	-	-

C.7 Persediaan

Persediaan
Rp5.487.584,-

Nilai Persediaan per 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp5.487.584 dan 0.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.Rincian Persediaan per 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan 30 Juni 2018 dan 2017

Jenis	2018	TH 2017
Barang Konsumsi	5,487,584	7,160,070
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Jumlah	5,487,584	7,160,070

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan
TP/TGR
Rp0,-

C.8 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2018 dan 31 Deesmber 2017 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp0,-

C.9 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Tanah
Rp14.913.607.000,-

C.10 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung per 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp14.913.607.000,- dan Rp14.913.607.000,-. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas tanah untuk Tahun 2018, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	14,913,607,000
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 30 Juni 2018	14,913,607,000

C.11 Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin
Rp4.919.016.580,-*

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp4.919.016.580,- dan Rp4.223.466.580,- Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	4,223,466,580
Mutasi tambah:	709,150,000
Pembelian	662,300,000
Hibah Barang	46,850,000
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	13,600,000
Reklas Keluar	(13,600,000)
Saldo per 30 Juni 2018	4,919,016,580
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2018	-3,633,740,976
Nilai Buku per 30 Juni 2018	1,285,275,604

Tabel rincian aset tetap peralatan dan mesin disajikan pada lampiran pendukung laporan keuangan ini .

C.12 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan
Rp9.703.196.000,-*

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp9.703.196.000,- dan Rp9.703.196.000,- Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas gedung dan bangunan untuk Tahun 2018, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	9,703,196,000
Mutasi tambah:	
Pengembangan nilai aset	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2018	9,703,196,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2018	(289,904,354)
Nilai Buku per 30 Juni 2018	9,413,291,646

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.13 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan,Jaringan
dan Irigasi
Rp1.294.917.000,
-

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.294.917.000,- dan Rp1.294.917.000,- Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas jalan, irigasi dan jaringan untuk Tahun 2018, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	1,294,917,000
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan teknologi informasi	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2018	1,294,917,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2018	(963,250,802)
Nilai Buku per 30 Juni 2018	331,666,198

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.14 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap
Lainnya
Rp65.860.978,-

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp65.860.978,- dan Rp65.860.978,- Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap lainnya ini untuk Tahun 2018, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	65,860,978
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 30 Juni 2018	65,860,978
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2018	-10,000,000
Nilai Buku per 30 Juni 2018	55,860,978

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0,-

C.15 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan Juni 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 .

C.16 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
(Rp4.896.896.132,-)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing (Rp4.896.896.132,-) dan (Rp4.531.166.982,-)Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
TA 2018

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4,918,531,580	3,633,740,976	1,284,790,604
2	Gedung dan Bangunan	9,703,196,000	289,904,354	9,413,291,646
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,294,917,000	963,250,802	331,666,198
4	Aset Tetap Lainnya	65,860,978	10,000,000	55,860,978
Akumulasi Penyusutan		15,982,505,558	4,896,896,132	11,085,609,426

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.17 Aset Tak Berwujud

Aset Tak
Berwujud
Rp25.000.000,-

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp25.000.000,- dan Rp25.000.000.,

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi

transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	25,000,000
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2018	25,000,000
Akumulasi Amortisasi s.d. 30 Juni 2018	(21,250,000)
Nilai Buku per 30 Juni 2018	3,750,000

C.18 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain
Rp6.770.000,-

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp6.770.000,- dan Rp6.770.000,- Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset lain-lain untuk Tahun 2018, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo per 31 Desember 2017	6,770,000
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 30 Juni 2018	6,770,000
Akumulasi Penyusutan	(6,262,682)
Nilai Buku per 30 Juni 2018	507,318

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.19 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp27.512.682,-

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing Rp27.512.682,- dan Rp26.881.341,- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan

kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	25,000,000	-21,250,000	3,750,000
Jumlah	25,000,000	-21,250,000	3,750,000
Aset Lain-lain	6,770,000	-6,262,682	507,318
Jumlah	31,770,000	-27,512,682	4,257,318

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka dari KPPN
Rp70.000.000,-

C.20 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp70.000.000,- dan Rp0,- (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp0,-

C.21 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp15.74.563,- Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Pendapatan Diterima di Muka
Rp0,-

C.22 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

C.23 Beban yang Masih Harus Dibayar

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp0,-*

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp0,- dan Rp0,- merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

C.24 Ekuitas

*Ekuitas
Rp26.009.446.328,-*

Ekuitas per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp26.009.446.328,- dan Rp25.666.454.742,- Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan
PNBP*

Rp10.099.038,-

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp10.099.038,- dan Rp11.511.002,- Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 30 Juni 2018 dan 2017

URAIAN	2018	2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	10,099,038	7,889,502	28.01
Penerimaan kembali persekot / uang muka gaji	0	3,621,500	-100.00
Jumlah	10,099,038	11,511,002	-12.27

D.2 Beban Pegawai

*Beban Pegawai
Rp6.778.732.948,-*

Jumlah Beban Pegawai per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp6.778.732.948,- dan Rp6.388.960.575,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai 30 Juni 2018 dan 2017

URAIAN	2018	2017	NAIK (TURUN) %
Beban gaji pokok PNS	1,543,365,700	1,653,836,940	-6.68
Beban pembulatan gaji PNS	20,385	20,123	1.30
Beban tunj. Suami/istri PNS	124,647,350	119,425,374	4.37
Beban Tunj. Anak PNS	27,699,848	23,891,803	15.94
Beban Tunj. Struktural PNS	45,855,000	32,670,000	40.36
Beban Tunj. Fungsional PNS	3,993,920,000	3,622,260,000	10.26
Beban Tunj. PPh PNS	775,780,785	664,324,457	16.78
Beban Tunj. Beras PNS	66,191,880	71,188,860	-7.02
Beban uang makan PNS	183,817,000	174,348,000	5.43
Beban tunjangan umum PNS	27,435,000	26,995,000	1.63
Jumlah	6,788,732,948	6,388,960,557	6.26

D.3 Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp34.583.521,-*

Jumlah Beban Persediaan per 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp34.583.521,- dan Rp54.479.279,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan 30 Juni 2018 dan 2017

URAIAN	2018	2017	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	34,583,521	54,479,279	-36.52
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	-	0	0.00
Beban Persediaan Lainnya	-	0	0.00
Jumlah	34,583,521	54,479,279	-36.52

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa
Rp278.735.558,-*

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp278.735.558,- dan Rp320.263.259,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas

barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	2018	2017	NAIK (TURUN) %
Beban keperluan perkantoran	182,699,995	166,364,100	9.82
Beban penambah daya tahan tubuh	0	5,228,750	(100.00)
Beban pengiriman surat dinas pos pusat	3,369,500	4,524,375	(25.53)
Beban honor operasional satuan kerja	23,500,000	24,000,000	(2.08)
Beban barang operasional lainnya	6,263,975	26,981,900	(76.78)
Beban bahan	12,871,813	17,205,500	(25.19)
Beban barang non operasional lainnya	0	3,600,000	(100.00)
Beban langganan listrik	47,024,205	64,848,025	(27.49)
Beban langganan telepon	1,346,070	7,510,609	(82.08)
Beban aset ekstrakomtabel peralatan dan mesin	1,660,000	0	0.00
Jumlah	278,735,558	320,263,259	(12.97)

D.5 Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan
Rp217.297.219,-*

Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp217.297.219,- dan Rp362.547.315,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan 30 Juni 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	2018	2017	NAIK (TURUN) %
Beban pemeliharaan gedung dan bangunan	60,158,626	142,166,865	(57.68)
Beban pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya	20,330,527	32,940,000	(38.28)
Beban pemeliharaan peralatan dan mesin	134,091,166	181,391,450	(26.08)
Beban pemeliharaan jaringan	0	1,961,000	(100.00)
Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan	2,716,900	4,088,000	(33.54)
Jumlah	217,297,219	362,547,315	(40.06)

D.6 Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp102.845.662,-*

Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp102.845.662,- dan Rp188.009.650,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Juni 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	2018	2017	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	80,795,662	185,909,650	-56.54
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	450,000	2,100,000	-78.57
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	21,600,000	0	0.00
Jumlah	102,845,662	188,009,650	-45.30

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp379.269.031,-*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp379.269.031,- dan Rp234.299.144,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 30 Juni 2017 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

30 Juni 2018 dan 2017

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2018	2017	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	202,495,612	119,819,039	69.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	144,952,177	108,018,096	34.19
Beban Penyusutan Jalan dan jembatan	30,283,833	1,000,000	2,928.38
Beban penyusutan irigasi	411,068	4,967,009	- 91.72
Beban penyusutan jaringan	495,000	495,000	-
Beban Amortisasi Software	625,000	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak digunakan	6,341	-	-
Jumlah Penyusutan	378,637,690	234,299,144	61.60

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp 0,-*

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

TA Juni 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	2018	2017	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	0.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	0.00
Jumlah	0	0	0.00

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp484.648,-*

D.9 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional TA Juni 2018 dan
2017*

URAIAN	2018	2017	NAIK (TURUN) %
Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL	50	5,773,359	(100.00)
Pendapatan penyesuaian nilai persediaan	1,871,739	2,815,725	
Jumlah pendapatan dr Keg.Non Operasional lainnya	1,871,789	8,589,084	
Beban penyesuaian nilai persediaan	1,387,141	2,765,950	
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	484,648	5,823,134	(91.68)

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp25.666.454.742,- Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2018 dan 30 Juni 2017 adalah masing-masing sebesar Rp25.666.454.742,- dan Rp10.669.118.093,-

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO
(Rp7.790.880.253,-) Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan Juni 2017 adalah sebesar (Rp7.790.880.253,-) dan (Rp7.531.193.068,-). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian
Nilai Aset
Rp0,- Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp0,- Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

*Selisih
Revaluasi Aset
Tetap Rp0,-*

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

*Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi
Rp(691.460,-)*

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar (Rp619.460,- dan Rp0,-.

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

*Koreksi Lain-
Lain Rp0,-*

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp0 , -dan Rp648.226,-

E.4 Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar
Entitas
Rp8.134.563.299,-*

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp8.134.563.299,- dan Rp7.683.616.796,- Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(10,099,088)
Ditagihkan ke Entitas Lain	8,096,152,387
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	48,510,000
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	8,134,563,299

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2018, DDEL sebesar (Rp10.099.088,-) sedangkan DKEL sebesar Rp8.096.152.387,-

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp0,- dan transfer keluar sebesar Rp 0,-

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp48.510.000,-

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 adalah Rp0,-

Ekuitas Akhir

Rp26.009.446.328

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp26.009.446.328 dan Rp10.822.190.047

A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Setelah tanggal Neraca tidak terjadi kejadian-kejadian penting pada kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.